

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional merupakan aktivitas pertukaran barang dan jasa yang terjadi karena adanya perbedaan keunggulan produksi, sumber daya, dan efisiensi biaya. Menurut Aulia et al., (2025) dalam *On The Principles of Political Economy and Taxation*, perdagangan akan memberikan manfaat apabila setiap negara memfokuskan diri pada komoditas yang memiliki keunggulan komparatif, yaitu barang yang dapat diproduksi dengan biaya peluang lebih rendah dibandingkan negara lain. Melalui kegiatan tersebut negara dapat meningkatkan efisiensi ekonomi serta memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat diproduksi secara optimal di dalam negeri.

Meskipun secara teori perdagangan dapat mendorong efisiensi dan kesejahteraan, dalam praktiknya arus perdagangan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah, termasuk *Non-Tariff Measures* (NTM). NTM merupakan kebijakan non-bea masuk seperti regulasi teknis, persyaratan perizinan, dan ketentuan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) yang bertujuan melindungi kepentingan nasional, kesehatan, dan keamanan. Menurut Amanta (2021), penerapan NTM dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan mempengaruhi volume perdagangan, sehingga meskipun tidak berbentuk tarif, kebijakan ini tetap berperan signifikan dalam menentukan kelancaran dan efisiensi perdagangan internasional.

### **2.1.2 Hambatan Impor Dalam Perdagangan Internasional**

Hambatan impor merupakan berbagai kebijakan atau regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mengatur maupun membatasi arus barang yang masuk dari luar negeri. Dalam kegiatan perdagangan internasional, kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kelancaran arus perdagangan karena berpotensi meningkatkan biaya perdagangan, memperlambat proses distribusi barang, serta membatasi jumlah komoditas yang dapat diperdagangkan antarnegara.

Secara umum, hambatan perdagangan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Hambatan tarif merupakan kebijakan yang dilakukan melalui pengenaan bea masuk atau pajak terhadap barang impor sehingga harga barang tersebut menjadi lebih tinggi di pasar domestik. Namun, seiring dengan berkembangnya liberalisasi perdagangan global dan berbagai perjanjian perdagangan internasional, penggunaan tarif perdagangan mengalami penurunan. Kondisi ini mendorong banyak negara untuk lebih mengandalkan kebijakan non-tarif sebagai instrumen pengaturan perdagangan maupun perlindungan terhadap kepentingan domestik. Leonardi, (2026) menjelaskan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, hambatan non-tarif semakin banyak digunakan oleh negara-negara di dunia sebagai bentuk regulasi perdagangan selain tarif.

### **2.1.3 *Non Tariff Barriers to Trade* (NTM)**

Salah satu bentuk hambatan perdagangan yang banyak digunakan dalam perdagangan internasional saat ini adalah *Non-Tariff Measures* (NTM).

Leonardi, (2026) mendefinisikan *Non-Tariff Measures* sebagai kebijakan perdagangan selain tarif yang dapat memberikan dampak ekonomi terhadap perdagangan internasional melalui perubahan jumlah barang yang diperdagangkan, harga komoditas, maupun arah arus perdagangan antarnegara.

Kebijakan non-tarif dapat mencakup berbagai bentuk regulasi yang harus dipenuhi oleh pelaku perdagangan internasional sebelum suatu barang dapat masuk ke pasar suatu negara. Regulasi tersebut antara lain berupa standar teknis produk, persyaratan kesehatan dan keamanan pangan, prosedur pemeriksaan, hingga ketentuan administratif yang mengatur proses perdagangan internasional. Dalam praktiknya, kebijakan tersebut dapat mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor karena eksportir harus memastikan bahwa produknya memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan impor.

Selain itu, penerapan kebijakan non-tarif juga dapat meningkatkan biaya perdagangan karena pelaku usaha harus menanggung berbagai biaya tambahan, seperti biaya kepatuhan terhadap regulasi, biaya administrasi, serta biaya prosedural yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan sertifikasi produk. Oleh karena itu, meskipun kebijakan non-tarif sering kali diterapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, kesehatan, maupun lingkungan, kebijakan tersebut tetap dapat memberikan dampak terhadap dinamika perdagangan internasional.

#### ***2.1.4 Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)***

Salah satu kategori utama dalam kebijakan *Non-Tariff Measures* adalah *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS). Kebijakan SPS merupakan regulasi yang bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, serta tumbuhan dari risiko biologis yang dapat timbul dari produk pangan atau komoditas pertanian yang diperdagangkan secara internasional. (Hidayat et al., 2025) Regulasi ini umumnya berkaitan dengan standar keamanan pangan, pengendalian hama dan penyakit tanaman, serta persyaratan kualitas dan higienitas produk pertanian.

Dalam perdagangan internasional, kebijakan SPS memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk pertanian yang diperdagangkan tidak membawa risiko bagi kesehatan maupun lingkungan negara tujuan impor. Namun, kebijakan tersebut juga dapat mempengaruhi arus perdagangan apabila suatu produk tidak memenuhi standar kesehatan atau keamanan yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait di negara tujuan. (WTO, 1998)

Selain kebijakan SPS, bentuk lain dari hambatan non-tarif adalah *Technical Barriers to Trade* (TBT), yaitu regulasi teknis yang menetapkan karakteristik produk seperti ukuran, desain, fungsi, standar kualitas, serta ketentuan pelabelan atau pengemasan produk sebelum barang dapat dipasarkan, (WTO, 1998). Meskipun bertujuan untuk menjamin kualitas dan keamanan produk di pasar domestik, kebijakan teknis tersebut dalam beberapa kasus juga dapat menjadi hambatan perdagangan apabila persyaratan yang diterapkan terlalu kompleks atau sulit dipenuhi oleh eksportir dari negara lain.

Dalam konteks perdagangan komoditas pertanian, kebijakan SPS sering kali menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran impor suatu negara. Produk pertanian umumnya memiliki risiko biologis yang lebih tinggi dibandingkan produk industri sehingga memerlukan pengawasan yang lebih ketat melalui proses karantina dan pemeriksaan kesehatan. Menurut Hidayat et al., (2025) apabila suatu komoditas tidak memenuhi standar kesehatan atau keamanan yang ditetapkan oleh otoritas karantina, maka impor komoditas tersebut dapat ditolak, dibatasi, atau bahkan dihentikan sementara. Kondisi tersebut dapat menimbulkan hambatan dalam proses impor serta berdampak pada kelancaran rantai pasok bahan baku bagi industri yang bergantung pada komoditas tersebut.

#### **2.1.5 Supply Chain**

Menurut Christopher, (2023), “*effective development and management of supply chain networks helps businesses cut costs and enhance customer value*”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *supply chain* bukan hanya sekedar alur perpindahan barang, tetapi suatu sistem yang menghubungkan berbagai pihak mulai dari pemasok bahan baku hingga konsumen akhir untuk menciptakan efisiensi dan nilai tambah. Hubungan antar pihak dalam rantai pasok bersifat saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam menciptakan kelancaran proses distribusi. Melalui koordinasi yang baik, proses pengadaan, produksi, hingga pengiriman dapat berjalan efektif sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta menekan biaya operasional.

Christopher, (2023) menyatakan bahwa *supply chain management* adalah konsep yang lebih luas daripada logistik karena mencakup keseluruhan

aliran barang, informasi, dan koordinasi antar organisasi untuk menciptakan keunggulan kompetitif, bukan hanya mengatur arus transportasi atau gudang saja. Dengan demikian *supply chain* tidak hanya fokus pada efisiensi operasional saja, tetapi juga fokus pada integrasi strategis antar pelaku usaha dalam satu jaringan yang saling bergantung. Integrasi tersebut memungkinkan setiap pelaku dalam rantai pasok untuk menanggapi perubahan permintaan pasar, gangguan distribusi, maupun dinamika kebijakan perdagangan secara lebih cepat dan terkoordinasi.

## **2.1.6 Teori Peran Dalam Operasional Logistik**

### **2.1.6.1 Peran EMKL**

Menurut Priyohadi et al., (2024), jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) merupakan salah satu bentuk pelayanan dalam transportasi laut yang berkaitan dengan pengurusan dokumen dan muatan kapal laut, termasuk tata kelola administrasi pelabuhan serta koordinasi dengan pihak pelayaran dan bea cukai dalam prosedur pemasukan dan pengeluaran barang di pelabuhan.

(Priyohadi et al., 2024) juga menguraikan peran freight forwarding dalam konteks logistik laut, di mana EMKL menjadi salah satu bagian yang menangani aspek teknis dan administratif pengangkutan barang melalui laut, berbeda dengan freight forwarder yang lebih luas cakupannya karena juga melibatkan moda transportasi lainnya.

### **2.1.6.2 Peran PPJK**

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) merupakan badan usaha yang bertindak sebagai kuasa dari importir atau eksportir dalam

melaksanakan kewajiban kepabeanan. Menurut Lazuardi (2024) kepabeanan memiliki peran strategis dalam perdagangan internasional karena berfungsi mengawasi lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean, melindungi masyarakat dari barang berbahaya, serta mengamankan penerimaan negara melalui pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Dalam praktiknya, PPJK menjalankan tugas administratif dan teknis seperti penyusunan dan penyampaian pemberitahuan pabean, penentuan klasifikasi barang (HS Code), perhitungan nilai pabean, hingga koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Secara normatif, keberadaan dan fungsi PPJK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (R. Indonesia, 2006), yang menyatakan bahwa pengurusan kewajiban pabean dapat dilakukan sendiri oleh importir/eksportir atau dikuasakan kepada pihak lain. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi praktik jasa kepabeanan di Indonesia. Lebih lanjut, pengaturan teknis mengenai PPJK diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK, 2007) tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, yang mensyaratkan bahwa perusahaan PPJK wajib memiliki tenaga ahli bersertifikat Ahli Kepabeanan sebagai bentuk standar kompetensi profesional. Sertifikasi ini memastikan bahwa pelaksana jasa kepabeanan memiliki pemahaman yang memadai mengenai regulasi kepabeanan, tata laksana impor-ekspor, serta kepatuhan terhadap prosedur kepabeanan.

Dengan demikian, PPJK tidak hanya berfungsi sebagai perantara administratif dalam proses impor dan ekspor, tetapi juga sebagai entitas

profesional yang menjamin kepatuhan hukum (compliance), ketepatan klasifikasi dan nilai pabean, serta kelancaran arus barang dalam sistem logistik nasional. Dalam konteks penelitian Anda yang membahas peran PPJK dalam menghadapi hambatan impor, landasan teori ini menegaskan bahwa kapasitas regulatif dan kompetensi teknis PPJK menjadi faktor kunci dalam mengelola risiko keterlambatan, penahanan barang, maupun kendala kebijakan perdagangan.

### **2.1.6.3 Prosedur dan Dokumen Karantina**

Dokumen impor pada proses karantina merupakan persyaratan administratif yang wajib dipenuhi oleh importir atau PPJK sebagai dasar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pemasukan barang dari luar negeri. (K. P. Indonesia, 2021) Dokumen-dokumen ini berfungsi untuk memastikan bahwa komoditas yang diimpor telah memenuhi ketentuan karantina, keamanan hayati, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### **1. Invoice (*Commercial Invoice*)**

*Commercial Invoice* merupakan dokumen utama dalam kegiatan perdagangan internasional yang berfungsi sebagai bukti transaksi antara eksportir dan importir. Dokumen ini memuat informasi penting seperti nama dan alamat penjual serta pembeli, uraian barang, jumlah, harga satuan, nilai total transaksi, syarat pembayaran, serta kondisi penyerahan barang (*Incoterms*). *Invoice* menjadi dasar penentuan nilai pabean untuk perhitungan

bea masuk maupun bea keluar serta dijadikan acuan dalam proses pelaporan ekspor–impor kepada pihak bea cukai.

## 2. *Packing List*

*Packing List* adalah dokumen pelengkap yang berisi rincian fisik barang yang dikirim, meliputi jumlah kemasan, berat bersih dan kotor, dimensi, serta jenis barang di dalam setiap kemasan. Dokumen ini digunakan oleh pihak pelabuhan, bea cukai, maupun perusahaan logistik untuk memudahkan pemeriksaan dan pencocokan antara barang fisik dengan data dokumen. *Packing List* juga berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh barang telah dikemas dan dikirim sesuai dengan pesanan.

## 3. *Bill of Lading*

*Bill of Lading* adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran sebagai bukti penerimaan barang untuk diangkut melalui laut dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan. *B/L* berfungsi sebagai tanda bukti kepemilikan barang, bukti perjanjian pengangkutan, serta bukti penerimaan barang oleh pihak pengangkut. Dokumen ini juga menjadi syarat bagi importir untuk menebus atau mengambil barang di pelabuhan tujuan setelah kedatangan kapal.

## 4. *Certificate of Origin (COO)*

*Certificate of Origin* merupakan dokumen resmi yang menyatakan negara asal suatu barang. Dokumen ini diterbitkan oleh instansi berwenang di negara eksportir dan digunakan untuk memperoleh fasilitas tarif preferensial atau pembebasan bea masuk berdasarkan perjanjian perdagangan antarnegara.

COO juga berfungsi untuk memenuhi ketentuan asal barang (*rules of origin*) serta memastikan transparansi asal produk dalam perdagangan internasional.

#### 5. *Fumigation Certificate*

*Fumigation Certificate* adalah dokumen yang menyatakan bahwa barang atau kemasan telah melalui proses fumigasi atau perlakuan pengasapan menggunakan bahan kimia tertentu guna membunuh hama, serangga, atau organisme pengganggu. Sertifikat ini biasanya diwajibkan untuk komoditas pertanian, bahan makanan, serta produk berbasis kayu sebelum dikirim ke luar negeri. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa barang yang diekspor atau diimpor bebas dari kontaminasi biologis yang dapat membahayakan lingkungan negara tujuan.

#### 6. *Phytosanitary Certificate*

*Phytosanitary Certificate* merupakan sertifikat kesehatan tumbuhan yang diterbitkan oleh otoritas karantina pertanian negara asal. Dokumen ini membuktikan bahwa komoditas tumbuhan atau hasil pertanian telah diperiksa dan dinyatakan bebas dari hama serta penyakit tumbuhan yang berpotensi menular. Sertifikat ini merupakan salah satu syarat wajib untuk kegiatan ekspor–impor produk pertanian agar memenuhi standar keamanan hayati (*biosecurity*).

#### 7. Polis Asuransi (*Insurance Policy*)

Polis Asuransi merupakan dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan barang selama proses pengiriman. Dokumen ini memuat

informasi mengenai nilai pertanggungan, jenis risiko yang ditanggung, jangka waktu perlindungan, dan pihak yang diasuransikan. Dalam perdagangan internasional, polis asuransi berfungsi memberikan jaminan keamanan terhadap nilai barang yang dikirim serta menjadi bukti klaim apabila terjadi kerugian.

#### 8. *Health Certificate*

*Health Certificate* adalah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi kesehatan atau otoritas veteriner di negara asal untuk menyatakan bahwa produk hewan atau bahan pangan yang diekspor maupun diimpor telah memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Sertifikat ini menjamin bahwa produk tersebut bebas dari penyakit menular dan aman untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan internasional maupun regulasi negara tujuan.

#### 9. *Certificate of Analysis (COA)*

*Certificate of Analysis* merupakan dokumen hasil uji laboratorium yang memuat rincian spesifikasi, kandungan, dan kualitas suatu produk. Dokumen ini biasanya diterbitkan oleh laboratorium independen atau lembaga pengujian yang berwenang. COA berfungsi untuk memastikan bahwa barang yang dikirim telah memenuhi standar mutu dan persyaratan teknis yang disepakati antara eksportir dan importir.

#### 10. *Prior Notice*

*Prior Notice* adalah pemberitahuan awal kepada otoritas negara tujuan (misalnya *Food and Drug Administration* – FDA di Amerika Serikat) terkait

kedatangan produk pangan impor. Dokumen ini digunakan untuk memberikan informasi awal mengenai jenis, jumlah, asal, dan jadwal kedatangan barang sebelum produk memasuki wilayah negara tujuan. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pemeriksaan dan memastikan keamanan produk sesuai regulasi yang berlaku.

### **2.1.7 Gap Analisis**

Gap Analysis merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kondisi aktual (current state) dengan kondisi yang diharapkan atau kondisi ideal (desired state). Melalui Gap Analysis, organisasi dapat mengetahui perbedaan antara kondisi yang terjadi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai sehingga dapat ditentukan langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan tersebut.

Menurut Renzi et al., (2021) Gap Analysis bertujuan untuk membandingkan kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan guna mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan, sumber daya yang dibutuhkan, strategi yang harus dilakukan, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penerapannya, Gap Analysis digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara kondisi aktual dan kondisi ideal sehingga dapat diketahui area yang memerlukan perbaikan. Hasil identifikasi kesenjangan tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan strategi atau tindakan perbaikan yang diperlukan.

Dalam penelitian ini, Gap Analysis digunakan untuk menganalisis hambatan yang terjadi pada proses impor kacang tanah asal India di PT Berkah Jaya Lestarindo setelah adanya perubahan kebijakan impor. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi aktual yang terjadi di lapangan dengan kondisi ideal yang seharusnya dicapai berdasarkan prosedur impor dan ketentuan yang berlaku. Kesenjangan yang ditemukan kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan solusi dan action plan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses impor.

#### **2.1.7.1 Tahapan Gap Analysis**

Gap Analysis dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan. Menurut Renzi et al., (2021) proses Gap Analysis dilakukan melalui beberapa tahapan yang bertujuan untuk mengetahui area yang memerlukan perbaikan serta menentukan langkah yang diperlukan untuk mencapai kondisi yang diharapkan.

##### **1. Identifikasi Kondisi Aktual (*Current State*).**

Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi kondisi yang terjadi saat ini berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kondisi aktual menggambarkan situasi nyata yang terjadi dalam suatu proses atau kegiatan yang sedang diteliti.

##### **2. Identifikasi Kondisi Ideal (*Desired State*).**

Kondisi ideal merupakan keadaan yang seharusnya dapat dicapai berdasarkan standar, prosedur, regulasi, atau target yang telah ditetapkan.

Kondisi ideal digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah suatu proses telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Analisis Kesenjangan (*Gap*).

Pada tahap ini dilakukan perbandingan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal untuk mengidentifikasi perbedaan atau kesenjangan yang terjadi. Kesenjangan tersebut menunjukkan area yang memerlukan perhatian dan perbaikan agar proses dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

4. Penyusunan Solusi Atau Tindakan Perbaikan (*improvement action*).

Setelah kesenjangan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mengatasi kesenjangan tersebut. Solusi yang disusun bertujuan untuk membantu organisasi mencapai kondisi yang lebih sesuai dengan standar atau target yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, Gap Analysis digunakan untuk membandingkan kondisi aktual proses impor kacang tanah asal India di PT Berkah Jaya Lestarindo dengan kondisi ideal berdasarkan prosedur impor dan ketentuan yang berlaku. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi serta menjadi dasar dalam penyusunan solusi dan action plan yang diusulkan.

## 2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

### 1. Analisis Efisiensi Peran *Freight Forwarding* dalam Proses Impor melalui *Transportasi Laut* (Arliansyah, 2026)

Penelitian mengenai *Analisis Efisiensi Peran Freight Forwarding dalam Proses Impor melalui Transportasi Laut* bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran freight forwarder dalam meningkatkan efisiensi proses impor serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dilakukan dalam kegiatan impor. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi pada perusahaan logistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa freight forwarder memiliki peran strategis dalam pengelolaan dokumen dan kepabeanan, koordinasi logistik, serta mitigasi risiko terhadap berbagai hambatan operasional. Hambatan yang sering terjadi meliputi keterlambatan pengiriman, miskomunikasi antar pihak, serta perubahan regulasi kepabeanan. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas peran jasa logistik dalam kegiatan impor. Namun demikian, penelitian tersebut lebih menekankan pada efisiensi proses impor dalam kondisi normal, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran EMKL dalam menghadapi hambatan impor akibat kebijakan penghentian impor kacang tanah asal India.

## **2. Analisis Peran *Freight Forwarder* dalam Kegiatan Ekspor dan Impor** **Rani *et al.* (2025)**

Penelitian mengenai *Analisis Peran Freight Forwarder dalam Kegiatan Ekspor dan Impor* bertujuan untuk mengkaji fungsi freight forwarder dalam menunjang kelancaran arus barang internasional. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode observasi lapangan dan wawancara terhadap pihak perusahaan logistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa freight forwarder memiliki peran strategis dalam pengurusan dokumen, koordinasi transportasi multimoda, serta pengelolaan risiko keterlambatan dan hambatan administratif. Hambatan yang sering terjadi meliputi keterlambatan dokumen, perubahan kebijakan perdagangan, serta kendala teknis di pelabuhan. Penelitian ini relevan dengan penelitian Anda karena EMKL termasuk bagian dari jasa freight forwarding yang memiliki tanggung jawab dalam memastikan kelancaran distribusi barang meskipun terdapat hambatan regulasi.

## **3. Peranan Freight Forwarder dalam Pengurusan Pemberitahuan Ekspor Barang pada Kantor Bea dan Cukai Belawan dengan Sistem Portal Pengguna Jasa Deliani *et al.* (2025)**

Penelitian yang dilakukan oleh Deliani *et al.* (2025) mengenai peranan freight forwarder dalam pengurusan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) bertujuan untuk menganalisis peran perusahaan jasa logistik dalam menangani proses administrasi kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan

deskriptif kualitatif dengan metode observasi dan wawancara terhadap pelaku operasional di perusahaan freight forwarder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa freight forwarder memiliki peran penting dalam pengurusan dokumen, koordinasi dengan instansi terkait, serta memastikan kelancaran proses kepabeanan. Selain itu, ditemukan berbagai hambatan dalam proses operasional, seperti kesalahan penginputan data, gangguan sistem, serta ketidaksesuaian dokumen yang dapat menyebabkan keterlambatan proses. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas peran jasa logistik dalam kegiatan kepabeanan. Namun, penelitian tersebut berfokus pada kegiatan ekspor, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada kegiatan impor serta dampak kebijakan penghentian impor terhadap operasional EMKL.

#### **4. Analisis Peran Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT Tunas Muda Sembada dalam Meningkatkan Kemudahan Impor di Pelabuhan Sahara *et al.* (2024)**

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Sahara dan Fathia Sausan Karimah (2024) berjudul Analisis Peran Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT Tunas Muda Sembada dalam Meningkatkan Kemudahan Impor di Pelabuhan bertujuan untuk menganalisis peran PPJK dalam kegiatan impor serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJK berperan penting sebagai perantara antara importir dan otoritas Bea Cukai, khususnya dalam penyusunan dokumen impor, pengajuan PIB, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan. Kendala yang ditemukan antara lain ketidaksesuaian dokumen dan perubahan regulasi yang dinamis. Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas peran PPJK dalam proses impor, namun penelitian Anda lebih menekankan pada strategi menghadapi hambatan impor akibat kebijakan tertentu.

**5. Peran EMKL dalam Impor *Full Container Load (FCL)* Jalur Merah oleh PT. Terminal Intimoda Utama Cabang Semarang Rengga *et al.* (2025)**

Penelitian dengan judul Peran EMKL dalam Impor *Full Container Load (FCL)* Jalur Merah oleh PT. Terminal Intimoda Utama Cabang Semarang bertujuan untuk menganalisis peran EMKL dalam kegiatan impor jalur merah, dokumen yang diperlukan, instansi yang terlibat, serta kendala yang dihadapi dalam proses pengurusan impor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa EMKL berperan penting dalam pengurusan impor, mulai dari pengelolaan dokumen, koordinasi dengan instansi terkait, hingga penanganan barang, namun masih menghadapi kendala seperti ketidaklengkapan dokumen, lamanya respon Bea dan Cukai, kesalahan PIB, serta ketidaksesuaian barang dengan dokumen yang menghambat proses

clearance. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan ketelitian dalam pengecekan dokumen, optimalisasi koordinasi antar pihak terkait, serta perbaikan sistem dan komunikasi antara EMKL dan importir agar proses impor dapat berjalan lebih efektif.

**6. *Disruptions in the Food Supply Chain: A Literature Review Reyes et al. (2024)***

Penelitian berjudul *Disruptions in the Food Supply Chain: A Literature Review* bertujuan untuk mengkaji berbagai bentuk gangguan dalam rantai pasok pangan serta dampaknya terhadap stabilitas distribusi dan ketersediaan barang. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis (systematic literature review) terhadap berbagai penelitian sebelumnya mengenai gangguan rantai pasok global.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan seperti pandemi, kebijakan perdagangan, dan hambatan logistik dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Koordinasi antar pelaku rantai pasok menjadi faktor penting dalam meminimalkan dampak gangguan tersebut.

**7. *The Impact of COVID-19 Trade Measures Steinbach et al. (2022)***

Penelitian dengan judul *The Impact of COVID-19 Trade Measures* bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pembatasan perdagangan selama pandemi terhadap arus perdagangan internasional, khususnya produk pangan dan pertanian. Pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif

dengan analisis data perdagangan internasional serta evaluasi kebijakan perdagangan yang diterapkan berbagai negara selama pandemi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan ekspor, peningkatan persyaratan impor, dan kebijakan protektif lainnya menyebabkan gangguan arus barang lintas negara. Kebijakan tersebut meningkatkan biaya perdagangan serta memperlambat distribusi komoditas penting, termasuk produk pangan.

#### **8. *The Cost of Non-Tariff Measures on Food and Agriculture in Indonesia***

**Felippa et al. (2021)**

Penelitian berjudul *The Cost of Non-Tariff Measures on Food and Agriculture in Indonesia* bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan non-tariff measures (NTM) terhadap biaya perdagangan produk pangan dan pertanian di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis econometric modeling untuk mengukur besaran biaya tambahan akibat penerapan NTM, seperti persyaratan sanitari dan fitosanitari serta regulasi teknis lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa NTM secara signifikan meningkatkan biaya impor produk pertanian. Meskipun bertujuan melindungi konsumen dan standar kualitas, kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan harga serta hambatan administratif dalam proses perdagangan.

#### **9. *Trade Facilitation in Perishable Agro-Food Products* Moise & Sorescu (2021)**

Penelitian dengan judul *Trade Facilitation in Perishable Agro-Food Products* bertujuan untuk menganalisis pentingnya fasilitasi perdagangan dalam

menjaga kelancaran distribusi produk agro-pangan yang mudah rusak. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kebijakan dan studi kuantitatif terhadap waktu serta biaya logistik dalam rantai pasok internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi prosedur kepabeanan, penyederhanaan dokumen, dan percepatan clearance sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus barang. Keterlambatan administrasi dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, terutama pada produk yang sensitif terhadap waktu.

***10. External Supply Risk of Agricultural Products Trade Along the Belt and Road Under the Background of COVID-19 Hu et al. (2023)***

Penelitian yang dilakukan oleh Hu, Guo, Wang, Shao, dan Wei (2023) dengan judul *External Supply Risk of Agricultural Products Trade Along the Belt and Road Under the Background of COVID-19* bertujuan untuk menganalisis risiko pasokan eksternal perdagangan produk pertanian di kawasan Belt and Road serta mengidentifikasi perubahan struktur jaringan perdagangan dan jenis risiko dominan yang memengaruhi ketahanan pasokan pangan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode analisis jaringan kompleks (*complex network analysis*) melalui pembangunan model risiko berbasis indeks konsentrasi impor, ketergantungan impor, serta indeks risiko COVID-19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi menyebabkan penurunan konektivitas jaringan perdagangan dan meningkatkan jumlah negara dengan

risiko pasokan menengah hingga tinggi, dimana risiko dominan berubah dari kombinasi menjadi risiko epidemi.

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahu

No	Judul Penelitian, Oleh dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persmaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Analisis Efisiensi Peran <i>Freight Forwarding</i> dalam Proses Impor melalui Transportasi Laut. (Arliansyah, 2026)	Menganalisis peran <i>freight forwarding</i> dalam meningkatkan efisiensi proses impor serta mengidentifikasi hambatan dan strategi yang dilakukan dalam kegiatan impor melalui transportasi laut.	Kualitatif deskriptif	<i>Freight forwarder</i> memiliki peran dalam meningkatkan efisiensi impor melalui pengelolaan dokumen kepabeanan, koordinasi logistik, serta mitigasi risiko. Hambatan pada keterlambatan pengiriman, miskomunikasi, dan perubahan regulasi kepabeanan.	Sama-sama membahas peran jasa logistik ( <i>freight forwarder/EMKL</i> ) dalam kegiatan impor serta menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis proses operasional dan hambatan yang terjadi.	Penelitian ini berfokus pada efisiensi proses impor dalam kondisi normal, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada peran EMKL dalam menghadapi hambatan impor akibat kebijakan penghentian impor kacang tanah asal India.
2.	Analisis Peran <i>Freight Forwarder</i> dalam Optimalisasi Rantai Pasok Multimoda untuk Efisiensi Biaya Logistik di Indonesia. (Lailan Noor & Muhammad Tohir, 2025)	Menganalisis peran <i>freight forwarder</i> dalam mengoptimalkan rantai pasok multimoda guna meningkatkan efisiensi biaya logistik di Indonesia.	Kualitatif deskriptif	Freight forwarder berperan dalam pengurusan dokumen, koordinasi kepabeanan, dan kelancaran arus barang	Membahas peran (EMKL) dalam kegiatan logistik dan rantai pasok, serta mengkaji fungsi strategis dalam pengelolaan dokumen, koordinasi operasional, dan efisiensi proses distribusi.	Tidak membahas hambatan kebijakan penghentian impor dan tidak fokus pada komoditas kacang tanah

No	Judul Penelitian, Oleh dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persmaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Peranan <i>Freight Forwarder</i> dalam Pengurusan Pemberitahuan Ekspor Barang pada Kantor Bea dan Cukai Belawan dengan Sistem Portal Pengguna Jasa.(Deliani & Aulia, 2025)	Menganalisis peran <i>freight forwarder</i> dalam pengurusan dokumen ekspor (PEB) melalui sistem kepabeanan	Kualitatif deskriptif (observasi dan wawancara)	<i>Freight forwarder</i> berperan dalam pengurusan dokumen, koordinasi dengan instansi, serta menjaga kelancaran proses kepabeanan. Ditemukan hambatan seperti kesalahan input data, gangguan sistem INSW, dan ketidaksesuaian dokumen	Sama-sama membahas peran EMKL/ <i>freight forwarder</i> dalam proses kepabeanan dan operasional logistik	Penelitian ini berfokus pada kegiatan ekspor (PEB), sedangkan penelitian penulis berfokus pada kegiatan impor dan dampak kebijakan penghentian impor kacang tanah asal India
4.	Analisis Peran Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT Tunas Muda Sembada Dalam Meningkatkan Kemudahan Impor Di Pelabuhan. (Sahara et al., 2024)	Menganalisis peran PPJK dalam proses impor serta kendala dan upaya perbaikannya	Deskriptif kualitatif (observasi & wawancara)	PPJK berperan dalam pengurusan dokumen, klasifikasi HS, perhitungan bea masuk, serta membantu mengatasi kendala regulasi dan teknis	Membahas peran jasa logistik dalam kegiatan impor, khususnya dalam pengurusan dokumen, koordinasi operasional, serta identifikasi hambatan dan upaya perbaikan dalam proses impor.	Penelitian ini berfokus pada peran EMKL dalam meningkatkan kemudahan impor di pelabuhan, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada peran EMKL dalam menghadapi gangguan impor akibat kebijakan penghentian impor kacang tanah asal India.

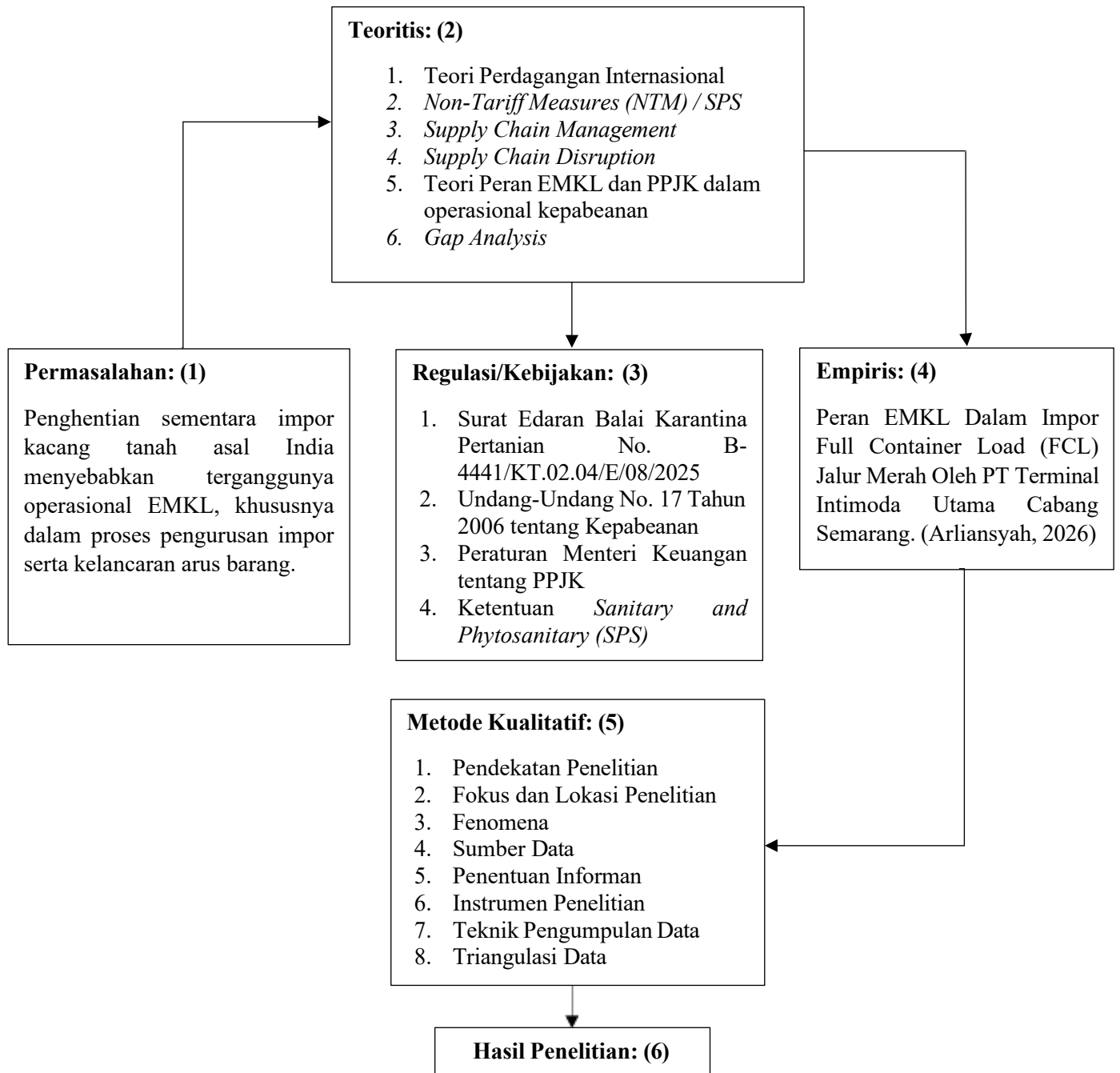
No	Judul Penelitian, Oleh dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persmaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Peran EMKL Dalam Impor <i>Full Container Load (FCL)</i> Jalur Merah Oleh PT Terminal Intimoda Utama Cabang Semarang. (Rengga et al., 2025)	Mengetahui peran EMKL dalam proses pengiriman barang ekspor serta mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya	Kualitatif	EMKL berperan sebagai penghubung dan pengurus dokumen serta pengiriman barang, namun masih menghadapi kendala seperti keterlambatan stuffing, peralatan, dan administrasi.	Sama-sama membahas peran EMKL dalam kegiatan logistik serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam proses pengiriman barang	Berfokus pada kegiatan ekspor impor secara umum dengan hambatan yang bersifat operasional internal. sedangkan penelitian penulis fokus pada peran EMKL dalam menghadapi kebijakan penghentian sementara impor kacang tanah asal India.
6.	<i>Disruptions in the Food Supply Chain: A Literature Review.</i> (Rojas-Reyes et al., 2024)	Mengklasifikasikan berbagai jenis gangguan dalam rantai pasok pangan dan metode penanganannya berdasarkan kajian literatur.	Kualitatif Literature Review	Gangguan utama pada rantai pasok pangan meliputi gangguan iklim, logistik & infrastruktur, biologis, serta <i>supply disruption</i> . Dibutuhkan strategi ketahanan dan manajemen risiko.	Sama-sama membahas gangguan dalam rantai pasok pangan dan pentingnya strategi respons terhadap disruption.	Penelitian ini bersifat konseptual dan global ( <i>review literatur</i> ). Penelitian Anda bersifat studi kasus operasional pada perusahaan EMKL dalam menghadapi hambatan impor (kacang tanah India).

No	Judul Penelitian, Oleh dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persmaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	<i>The Impact of COVID-19 Trade Measures on Agricultural and Food Trade.</i> (Ahn & Steinbach, 2023)	Menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan <i>non-tariff measures (NTMs)</i> selama pandemi COVID-19 serta dampaknya terhadap perdagangan sektor pertanian dan pangan.	Kuantitatif	<i>Export restriction</i> menurunkan perdagangan hingga 27,5% secara signifikan	Sama-sama membahas kebijakan <i>non-tariff measures (NTMs)</i> dalam perdagangan komoditas pangan serta dampaknya terhadap aktivitas impor dan rantai pasok.	Penelitian ini berfokus pada analisis dampak kebijakan NTMs secara makro dalam skala global, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada peran EMKL dalam menghadapi dampak kebijakan penghentian impor secara operasional di tingkat perusahaan.
8.	<i>The Cost of Non-Tariff Measures on Food and Agriculture in Indonesia</i> (Amanta, 2021)	Menganalisis dampak penerapan <i>non-tariff measures (NTMs)</i> terhadap perdagangan sektor pangan dan pertanian di Indonesia, khususnya terhadap biaya logistik, efisiensi perdagangan, dan ketahanan pangan.	Kualitatif Deskriptif	NTMs secara signifikan meningkatkan biaya logistik, memperlambat proses impor, serta menurunkan efisiensi perdagangan dan berpotensi menjadi hambatan perdagangan yang berdampak pada kenaikan harga domestik dan terganggunya ketersediaan pangan.	Sama-sama membahas hambatan impor akibat kebijakan pemerintah di sektor pangan	Fokus pada dampak kebijakan NTMs terhadap biaya dan sistem perdagangan secara umum di Indonesia, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada peran EMKL dalam menghadapi hambatan akibat kebijakan penghentian impor.

No	Judul Penelitian, Oleh dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil	Persmaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	<i>Trade Facilitation in Perishable Agro-Food Products</i> (Moisé & Sorescu, 2021)	Menganalisis tantangan dalam proses perdagangan komoditas agro-food yang mudah rusak ( <i>perishable</i> ) di perbatasan serta mengidentifikasi kebijakan <i>trade facilitation</i> yang dapat meningkatkan efisiensi proses impor dan ekspor.	Kualitatif	Hambatan utama perdagangan <i>agro-food</i> meliputi kompleksitas dokumen, banyaknya instansi, dan lamanya inspeksi yang berdampak pada kualitas barang, serta kebijakan SPS dan TBT yang meningkatkan biaya dan waktu impor. perbaiki melalui dokumen, digitalisasi, dan peningkatan koordinasi antar instansi.	Sama-sama membahas perdagangan komoditas pangan ( <i>agro-food</i> ) serta hambatan dalam proses impor yang disebabkan oleh kebijakan <i>non-tariff measures</i> (SPS dan TBT) dan proses di perbatasan.	Fokus pada analisis kebijakan <i>trade facilitation</i> secara makro dan internasional, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada peran EMKL dalam menghadapi hambatan impor akibat kebijakan penghentian impor.
10.	<i>External Supply Risk of Agricultural Products Trade along the Belt and Road under the Background of COVID-19.</i> (Hu et al., 2023)	Menganalisis risiko ketergantungan eksternal dan gangguan perdagangan produk pertanian akibat COVID-19 serta dampaknya terhadap keamanan pangan dan jaringan perdagangan internasional.	Kuantitatif	Risiko ketergantungan impor meningkat selama pandemi. Banyak negara mengalami peningkatan risiko pasokan akibat pembatasan ekspor dan kebijakan perdagangan. Risiko dominan berubah menjadi risiko epidemi pada 2021.	Sama-sama membahas gangguan perdagangan produk pertanian akibat kebijakan/pembatasan dan dampaknya terhadap sistem impor. Fokus pada risiko eksternal pasokan pangan.	Penelitian ini fokus pada analisis makro jaringan perdagangan internasional dan risiko negara. Penelitian Anda fokus pada level operasional perusahaan EMKL dalam menghadapi hambatan impor secara praktis dan administratif.

### 2.3 Alur Kerangka Penelitian

Alur kerangka penelitian bertujuan untuk menunjukkan cara peneliti meneliti topik yang dibahas. Berikut bagan alur kerangka penelitian:



**Gambar 2.1** Alur Kerangka Penelitian

Sumber: Olah Data Peneliti, 2026